

Evaluasi Pelaksanaan Program Terminal Parkir Elektronik (TPE) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung

Bela Puji Utami, Atik Rochaeni, Lukman Munawar Fauzi

Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi

ARTICLE HISTORY

Received : 30 Agustus 2025
Revised : 30 September 2025
Accepted : 20 November 2025

KEYWORDS

Electronic Parking Terminal, Local Revenue (PAD), Program Evaluation, CIPP Model, Bandung City

CORRESPONDENSI

Nama : Bela Puji Utami
Email : belapuji785@gmail.com



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

ABSTRACT

This study evaluates the implementation of the Electronic Parking Terminal (TPE) Program in Bandung City and its effectiveness in enhancing local revenue (PAD) from parking retribution. The research aims to assess the extent to which TPE improves efficiency, transparency, and accountability in parking management. Using a descriptive qualitative approach with the CIPP (Context, Input, Process, Product) evaluation model, data were collected through interviews, observations, documentation, and literature review. The findings show that although TPE was designed to reduce revenue leakage and illegal parking practices, its implementation has not yet achieved optimal outcomes. In the context dimension, social readiness and community adaptation to digital systems remain limited. From the input perspective, uneven machine distribution, frequent malfunction, and insufficient training for parking attendants hinder operational performance. In the process dimension, low digital literacy, technical issues, and weak supervision result in continued reliance on manual transactions. In terms of product, TPE contributes positively to transparency and accountability, yet its impact on increasing PAD remains below government targets. The study concludes that while TPE holds promising potential, significant improvements in infrastructure, human resources, and regulatory enforcement are required. Future research should adopt comparative and quantitative approaches to better measure financial impacts and deepen understanding of community behavior toward digital parking innovations.

Pendahuluan

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat di Kota Bandung dari tahun ke tahun berdampak langsung pada tingginya mobilitas masyarakat dan volume kendaraan bermotor. Kota Bandung sebagai salah satu destinasi wisata dan pusat kegiatan ekonomi mengalami tekanan pada sektor transportasi, terutama ketersediaan lahan parkir yang terbatas. Situasi ini mendorong Pemerintah Kota Bandung meluncurkan program Terminal Parkir Elektronik (TPE) sebagai solusi untuk menggantikan sistem parkir manual yang rentan terhadap kebocoran pendapatan, praktik pungutan liar, serta ketidaktertiban pengelolaan parkir. Kehadiran TPE diharapkan mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir.

Namun demikian, penerapan TPE di Kota Bandung belum berjalan sesuai harapan. Data menunjukkan masih banyak mesin parkir yang tidak aktif dan belum digunakan secara maksimal. Masyarakat pun cenderung enggan memanfaatkan mesin elektronik karena keterbatasan sosialisasi, kebiasaan membayar secara manual, serta adanya juru

parkir tidak resmi yang tetap beroperasi. Kondisi ini menandakan adanya permasalahan struktural, teknis, maupun sosial dalam implementasi kebijakan, sehingga penting dilakukan evaluasi komprehensif untuk mengetahui sejauh mana program TPE berfungsi dalam meningkatkan PAD.

Tabel 1. Jumlah dan Persebaran TPE di Zona Pusat dan Zona Penyangga Kota Bandung

No.	TPE	Ruas Jalan	Zona		Remarks
			Pusat	Penyangga	
1	445 TPE	70	246	199	445
2	250 TPE (Aktif)	50	195	55	250
3	195 TPE (Non Aktif)	48	66	129	195
No.	TPE	Ruas Jalan	Kerusakkan		Remarks
			Hardware	Other	
1	195 TPE (Non Aktif)	48	177	18	195

Sumber. Unit Pengelola Teknis Parkir Dinas Perhubungan Bandung, 2025

Penelitian terdahulu memberikan landasan penting namun menyisakan sejumlah kesenjangan. Qohar (2018) menemukan pertumbuhan kendaraan berdampak pada potensi penerimaan parkir, namun belum menjamin optimalisasi pendapatan. Nurmawan et al. (2024) menyoroti kebocoran retribusi parkir akibat lemahnya pengawasan. Teturan et al. (2023) mengidentifikasi maraknya parkir liar yang mengurangi penerimaan resmi dan menimbulkan kemacetan. Dewi (2024) menunjukkan bahwa penerapan TPE belum mampu mencapai target penerimaan yang diharapkan. Sementara itu, Putra (2004) dan Mutaqin et al. (2025) menyoroti kurangnya sosialisasi serta resistensi masyarakat terhadap penggunaan mesin. Dari temuan ini, terlihat bahwa belum ada penelitian yang secara menyeluruh mengevaluasi pelaksanaan TPE dengan mengintegrasikan aspek teknis, sosial, dan kelembagaan.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menawarkan analisis komprehensif terhadap implementasi TPE di Kota Bandung. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus evaluasi yang tidak hanya menilai kontribusi TPE terhadap PAD, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor penghambat serta menawarkan rekomendasi perbaikan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran empiris, tetapi juga memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur kebijakan publik mengenai inovasi digitalisasi layanan pemerintah daerah.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan sebagai berikut: (1) Bagaimana pelaksanaan program Terminal Parkir Elektronik (TPE) di Kota Bandung dalam upaya meningkatkan PAD? (2) Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi TPE baik dari aspek teknis, sosial, maupun kelembagaan? (3) Bagaimana kontribusi TPE terhadap efektivitas pengelolaan retribusi parkir dan transparansi PAD?.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi pelaksanaan program TPE secara menyeluruh untuk menilai efektivitas, kendala, serta dampaknya terhadap PAD. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Bandung dalam memperbaiki pengelolaan retribusi parkir berbasis elektronik. Sementara secara akademik, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian implementasi kebijakan publik di era digitalisasi pemerintahan, khususnya dalam konteks tata kelola transportasi perkotaan. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, mengukur tingkat keberhasilan program, dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mengangkat judul "Evaluasi Pelaksanaan Program Terminal Parkir Elektronik (TPE) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung".

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk memahami suatu fenomena secara menyeluruh dalam konteks alamiah. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2018) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena dianggap mampu menyajikan analisis terkait evaluasi pelaksanaan program Terminal Parkir Elektronik (TPE) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi pustaka dan studi lapangan berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian penelitian ini menggunakan teknik analisis data Menurut Miles dan Huberman dalam Samsu (2017) dengan meliputi pengumpulan data (*Data Collection*), reduksi data (*Data Reducation*), penyajian data (*Data Display*) dan penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*). Untuk lebih memperjelas arah analisis serta memudahkan dalam mengarahkan pembahasan dalam penelitian ini, penulis menggunakan model evaluasi program yang dikembangkan oleh Stufflebeam dalam Triani et al. (2021) teori ini biasa di kenal CIPP yang merupakan singkatan dari *Context evaluation* (Evaluasi konteks), *Input evaluation* (Evaluasi Masukan), *Process evaluation* (Evaluasi masukan), dan *Product evaluation* (Evaluasi Produk).

Hasil dan Pembahasan

Program Pelayanan Cetak Dokumen Langsung di Desa Rokan Koto Ruang Kabupaten Rokan Hulu Sebuah Pendekatan / Efektivitas

Dalam analisis efektivitas program Pecel Desa, penulis mencoba menjelaskan fokus yang diamati dengan berpedoman pada teori yang di kemukakan oleh Riant Nugroho (2011) dalam (Rahmatilah et al., 2021) terdapat tiga elemen untuk mengukur efektivitas sebuah program yakni tepat program, tepat pelaksana, dan tepat target.

Evaluasi Pelaksanaan Program Terminal Parkir Elektronik (TPE) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan Program Terminal Parkir Elektronik (TPE) dengan menggunakan model CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Stufflebeam. Model ini dipilih karena mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana suatu program direncanakan, diimplementasikan, dan menghasilkan dampak yang relevan bagi tujuan utama, yaitu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung melalui retribusi parkir.

A. Context Evaluation (Evaluasi Konteks)

Evaluasi konteks bertujuan mengidentifikasi kebutuhan, permasalahan, dan aset yang menjadi dasar pelaksanaan Program TPE. Lindgren & Jansson (2020) tentang penerimaan masyarakat terhadap sistem digital.

1. Aspek Kebutuhan

Kebutuhan utama dalam implementasi TPE meliputi ketersediaan mesin yang merata, berfungsi optimal, serta dukungan jaringan internet yang stabil. Selain itu, dibutuhkan kartu tapping atau uang elektronik, sistem keamanan yang baik, serta sarana pendukung seperti teknisi perawatan dan sistem pengawasan lapangan. Dari sisi non-teknis, sosialisasi dan edukasi intensif juga penting agar masyarakat terbiasa menggunakan layanan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kebutuhan ini belum sepenuhnya terpenuhi. Banyak mesin masih rusak atau tidak berfungsi, dan masyarakat cenderung memilih pembayaran manual. Kondisi ini menghambat tercapainya tujuan program. Kondisi infrastruktur yang tidak optimal serupa dengan temuan di kota lain, misalnya studi Hidayat, Munandar, & Armidiana (2018) yang menekankan pentingnya kesiapan teknis mesin e-parking sebelum implementasi luas.

2. Aspek Permasalahan

Permasalahan utama terletak pada aspek teknis, operasional, dan penerimaan masyarakat. Mesin TPE sering mengalami kerusakan seperti layar blank, aki lemah, dan error sistem, sementara teknisi terbatas sehingga perbaikan tidak cepat dilakukan. Dari sisi operasional, juru parkir masih banyak yang belum sepenuhnya memahami penggunaan TPE dan sebagian melakukan kecurangan dalam penarikan tarif. Dari sisi penerimaan masyarakat, banyak pengguna lebih nyaman membayar manual karena minimnya sosialisasi. Temuan ini konsisten dengan penelitian Dewi (2024) yang menyatakan bahwa resistensi masyarakat terhadap e-parking di Surabaya terjadi karena rendahnya literasi

digital dan minim edukasi publik. Hal ini juga konsisten dengan penelitian Calcabilla, Budiman, & Dyastari (2023) yang menemukan resistensi masyarakat terhadap e-parking di Samarinda karena faktor teknis dan sosialisasi yang terbatas.

3. Aspek Aset

Aset yang tersedia berupa mesin TPE, SDM juru parkir, pengawas lapangan, dan jaringan internet. Namun, jumlah pengawas hanya 25 orang untuk lebih dari 1.300 juru parkir, sehingga pengawasan kurang efektif. Dari sisi aset sosial, penerimaan masyarakat masih rendah. Penelitian Putra (2004) juga menunjukkan bahwa keberhasilan inovasi parkir digital sangat dipengaruhi oleh penerimaan publik, bukan hanya faktor teknis. Dengan demikian, aset fisik dan sosial dalam program TPE di Kota Bandung belum dikelola secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan. Hariyoko, Mahmudi, & Firmansyah (2025) menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan parkir digital sangat dipengaruhi kesiapan SDM pengawas dan dukungan kebijakan pendukung.

Kondisi mesin yang tidak berfungsi menghambat pengguna dalam melakukan pembayaran secara non-tunai, sehingga mendorong sebagian besar masyarakat kembali memilih metode pembayaran manual. Dengan demikian, keberhasilan program TPE sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan kesiapan teknis mesin di lapangan.

B. Input Evaluation (Evaluasi Masukan)

Evaluasi input fokus pada perencanaan dan alokasi sumber daya program. Almeida & Silva (2021) tentang tantangan kebijakan smart mobility dan e-parking.

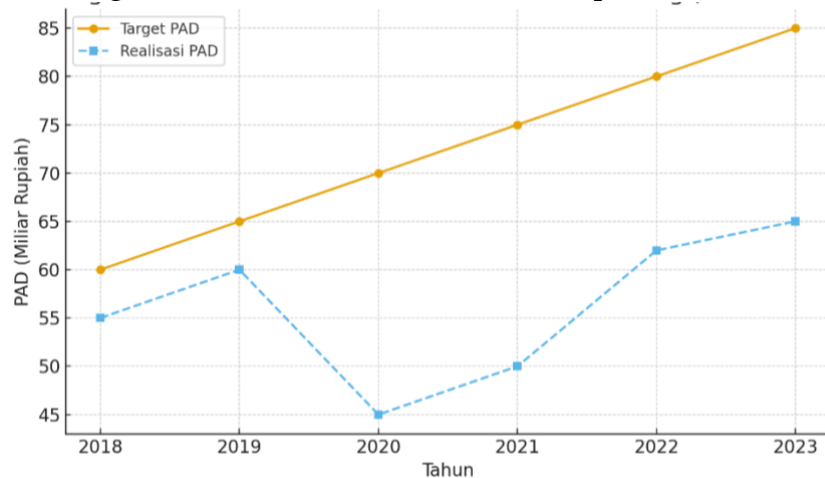
1. Aspek Perencanaan Program

Dinas Perhubungan telah menyusun rencana kerja yang sistematis, meliputi penentuan lokasi, pengadaan alat, dan pelatihan SDM. Namun, realisasi di lapangan belum optimal. Penyebaran mesin tidak merata, dan perencanaan belum memperhitungkan faktor risiko seperti vandalisme dan cuaca. Selain itu, kebijakan yang mendukung implementasi TPE belum lengkap, sehingga regulasi tidak cukup kuat. Penelitian Nurmawan et al. (2024) menegaskan bahwa keberhasilan program berbasis digital sangat dipengaruhi oleh kesiapan regulasi dan konsistensi implementasi di lapangan. Hal ini sejalan dengan Sabatier & Mazmanian (1980) yang menekankan pentingnya kejelasan regulasi dalam implementasi kebijakan publik.

2. Aspek Pengalokasian Sumber Daya

Sumber daya seperti mesin, petugas, dan anggaran operasional memang tersedia, tetapi distribusinya tidak merata. Banyak mesin tidak berfungsi, keterampilan petugas beragam, dan anggaran pemeliharaan relatif kecil. Jumlah pengawas jauh lebih sedikit dibandingkan kebutuhan lapangan. Hal ini sejalan dengan temuan Qohar (2018) yang menyoroti bahwa ketidakseimbangan antara kebutuhan lapangan dengan sumber daya merupakan faktor utama gagalnya optimalisasi retribusi parkir. Studi Matland (1995) juga menyoroti bahwa ketidakseimbangan input sumber daya memicu konflik dalam pelaksanaan kebijakan.

Gambar 1. Grafik target vs realisasi PAD dari retribusi parkir Kota Bandung 2018–2023



Sumber: Data Olahan Peneliti, 2023

Grafik ini menggambarkan perbandingan antara target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir di Kota Bandung selama periode 2018–2023. Terlihat bahwa realisasi PAD cenderung berada di bawah target yang telah ditetapkan pemerintah daerah, terutama pada tahun 2020 saat pandemi Covid-19 yang berdampak pada aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Kesenjangan antara target dan realisasi menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan inovasi melalui penerapan Terminal Parkir Elektronik (TPE), optimalisasi kontribusi sektor parkir terhadap PAD masih menghadapi kendala, baik dari sisi teknis, operasional, maupun penerimaan masyarakat.

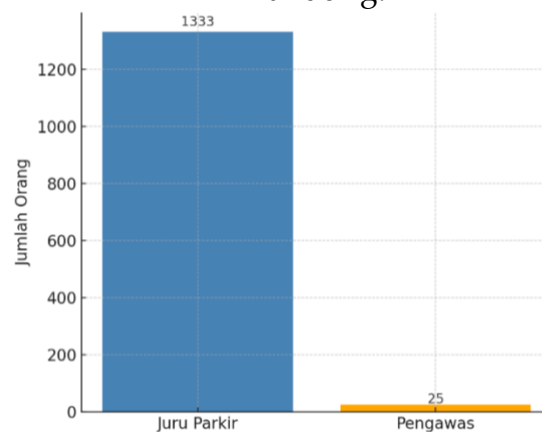
C. Process Evaluation (Evaluasi Proses)

Evaluasi proses menilai bagaimana program dilaksanakan dan kendala yang muncul. Sosialisasi telah dilakukan melalui media cetak, televisi, spanduk, dan edukasi langsung. Namun, sosialisasi masih terbatas dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Akibatnya, banyak pengguna masih enggan menggunakan mesin TPE. Dari sisi operasional, juru parkir membantu pengguna, tetapi sebagian kesulitan karena faktor usia atau kurangnya pelatihan. Pengawasan juga terbatas karena jumlah pengawas tidak sebanding dengan luas wilayah pengelolaan parkir.

Kendala teknis seperti kerusakan mesin, error sistem, dan vandalisme sering terjadi, membuat sebagian besar transaksi kembali dilakukan manual. Selain itu, belum adanya regulasi atau sanksi tegas bagi pelanggaran membuat penerapan program tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai. Penelitian Mutaqin et al. (2025) menegaskan bahwa literasi digital masyarakat dan dukungan regulasi adalah faktor penentu keberhasilan sistem berbasis teknologi di sektor publik. Penelitian Suherman (2020) menemukan bahwa rendahnya literasi digital masyarakat berpengaruh langsung pada kegagalan implementasi TPE di Bandung. Pengalaman Kota Bandung dalam implementasi Terminal Parkir Elektronik (TPE) menunjukkan masih banyak kendala teknis dan keterbatasan sosialisasi. Sebagai pembandingan, penelitian Rahmawati dan Prasetyo (2022) di Yogyakarta menemukan bahwa keberhasilan penerapan e-parking tidak hanya ditentukan oleh

infrastruktur, tetapi juga konsistensi dukungan kebijakan lokal dan partisipasi aktif masyarakat. Mereka menekankan bahwa keberhasilan proses implementasi membutuhkan koordinasi lintas instansi, terutama antara Dinas Perhubungan dan aparat penegak hukum untuk menekan praktik parkir liar. Temuan ini memperlihatkan bahwa kelemahan pada aspek proses di Bandung sebenarnya dapat diminimalisasi jika terdapat regulasi yang jelas serta integrasi kelembagaan yang lebih kuat. Dengan demikian, pembelajaran dari Yogyakarta dapat dijadikan acuan dalam memperbaiki pelaksanaan TPE di Bandung.

Gambar 2. Diagram Perbandingan Jumlah Juru Parkir dengan Jumlah Pengawas di Kota Bandung.



Sumber: Data Olahan Peneliti, 2023

Diagram ini memperlihatkan ketimpangan jumlah antara juru parkir dan pengawas yang bertugas dalam implementasi Terminal Parkir Elektronik (TPE) di Kota Bandung. Terdapat sekitar 1.333 juru parkir yang tersebar di lebih dari 200 ruas jalan, sedangkan jumlah pengawas hanya 25 orang. Rasio ini menunjukkan bahwa satu orang pengawas harus membawahi lebih dari 50 juru parkir. Kondisi ini berdampak pada lemahnya pengawasan di lapangan, sehingga masih banyak terjadi penyimpangan seperti kerusakan mesin yang lambat ditangani, kecurangan dalam penarikan retribusi, serta rendahnya kepatuhan terhadap penggunaan TPE. Oleh karena itu, ketidakseimbangan ini menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi efektivitas program TPE dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

D. Product Evaluation (Evaluasi Produk)

Evaluasi produk menilai sejauh mana program TPE mencapai hasil yang diharapkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi TPE terhadap peningkatan PAD masih belum signifikan. Namun, dari perspektif efektivitas pengendalian perilaku, studi Chen, Zhang, dan Wang (2023) menegaskan bahwa penerapan e-parking di beberapa kota besar mampu menekan angka parkir liar secara signifikan. Efek positif ini muncul karena sistem digital memberikan kepastian tarif, memudahkan penegakan aturan, dan mengurangi peluang manipulasi oleh petugas lapangan. Jika Bandung dapat meningkatkan keandalan

mesin dan memperluas cakupan penggunaan TPE, maka dampak positif terhadap berkurangnya parkir ilegal juga berpotensi tercapai. Dengan kata lain, kendala yang ada bukan pada konsep kebijakan, melainkan pada kualitas pelaksanaan dan keberlanjutan pemeliharaan sistem.

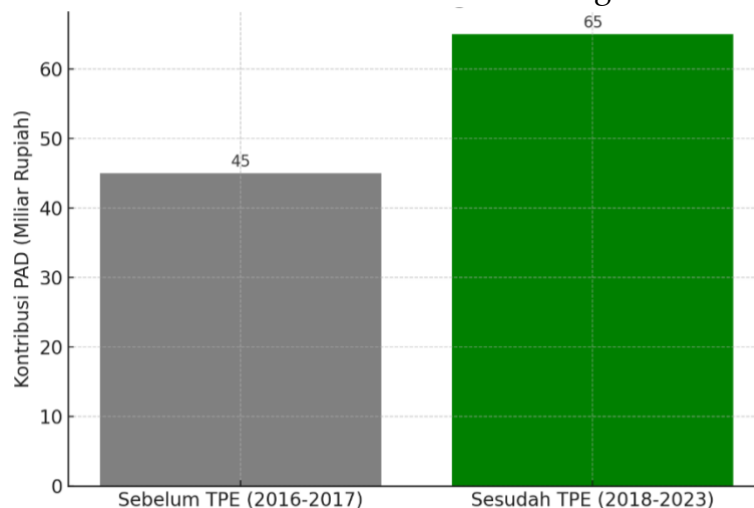
1. Aspek Pencapaian Target

Hasil penelitian menunjukkan bahwa TPE belum sepenuhnya mencapai target peningkatan PAD. Realisasi pendapatan masih jauh dari harapan karena keterbatasan infrastruktur, rendahnya pemeliharaan mesin, dan rendahnya penerimaan masyarakat. Hal ini konsisten dengan penelitian Dewi (2024) yang menemukan bahwa kontribusi e-parking terhadap PAD di Surabaya juga masih rendah karena resistensi publik.

2. Dampak Program

Dari sisi positif, TPE membuat sistem parkir lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Sistem ini membantu mengurangi kebocoran retribusi dan memberi kepastian tarif. Dari sisi negatif, program menimbulkan beban biaya pemeliharaan yang tinggi, hambatan teknis, serta rendahnya adaptasi juru parkir dan masyarakat. Dengan demikian, meskipun program ini memiliki potensi besar, kontribusinya terhadap PAD Kota Bandung masih belum maksimal. Temuan serupa ditunjukkan oleh Hidayat et al. (2018) serta Sabatier & Mazmanian (1980) bahwa aspek akuntabilitas dan transparansi menjadi keunggulan utama program digital meski kendala teknis masih besar. Penelitian Putra (2004) dan Nurmawan et al. (2024) sama-sama menegaskan bahwa keberhasilan inovasi digital seperti TPE memerlukan sinergi antara infrastruktur, SDM, kebijakan, dan penerimaan publik. Tanpa itu, inovasi hanya menjadi kebijakan formal yang sulit diimplementasikan.

Gambar 3. Grafik Kontribusi PAD Parkir Kota Bandung Sebelum dan Sesudah TPE.



Sumber: Data Olahan Peneliti, 2023

Grafik ini menunjukkan perbandingan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir sebelum dan sesudah penerapan Terminal Parkir Elektronik (TPE) di Kota Bandung. Pada periode sebelum TPE (2016–2017), kontribusi PAD parkir relatif stagnan di kisaran Rp45 miliar per tahun. Setelah penerapan TPE (2018–2023), kontribusi PAD mengalami peningkatan hingga mencapai sekitar Rp65 miliar, meskipun capaian tersebut

masih belum sesuai target yang ditetapkan pemerintah daerah. Kenaikan kontribusi ini mencerminkan adanya dampak positif dari modernisasi sistem parkir, namun efektivitasnya masih terhambat oleh kendala teknis, operasional, serta rendahnya penerimaan masyarakat terhadap sistem non-tunai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa TPE di Kota Bandung memiliki potensi untuk meningkatkan PAD, namun implementasinya menghadapi berbagai kendala teknis, sosial, dan kebijakan. Temuan ini menegaskan bahwa evaluasi program berbasis CIPP mampu mengungkap kelemahan di setiap tahapan, sehingga dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan. Penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya mengenai pentingnya kesiapan regulasi, literasi digital, dan penerimaan masyarakat dalam keberhasilan sistem digital di sektor publik. Seperti diuraikan oleh Van Meter & Van Horn (1975) serta Matland (1995), keberhasilan implementasi kebijakan publik membutuhkan keseimbangan antara konteks, sumber daya, proses, dan hasil. Secara keseluruhan, penerapan TPE di Kota Bandung memang menghadapi banyak kendala teknis, sosial, dan regulasi. Namun, sebagaimana diuraikan oleh Santoso dan Widodo (2022) hubungan antara parkir elektronik dan peningkatan PAD di kota besar Indonesia sangat dipengaruhi oleh keberlanjutan kebijakan serta kesiapan infrastruktur pendukung. Tanpa adanya penguatan kapasitas juru parkir, sosialisasi masyarakat, dan kepastian hukum, sistem e-parking hanya akan menghasilkan kenaikan pendapatan yang bersifat jangka pendek. Oleh karena itu, meskipun TPE di Bandung telah memberikan dampak positif terhadap transparansi dan akuntabilitas, pencapaian optimal terhadap PAD baru akan terwujud jika ada sinergi antara faktor teknis, regulasi, dan penerimaan publik.

Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Terminal Parkir Elektronik (TPE) di Kota Bandung memiliki potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun realisasinya belum optimal. Dari sisi konteks, TPE dirancang untuk menutup celah kebocoran retribusi, tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan kesiapan sosial masyarakat. Dari sisi input, keterbatasan jumlah mesin berfungsi, distribusi yang tidak merata, serta minimnya pelatihan juru parkir menjadi penghambat utama. Dari sisi proses, kendala teknis, lemahnya pengawasan, dan rendahnya literasi digital masyarakat membuat sebagian besar transaksi masih berlangsung secara manual. Dari sisi produk, meskipun terdapat peningkatan kontribusi PAD setelah penerapan TPE, capaian tersebut masih jauh dari target pemerintah daerah. Dengan demikian, TPE memberikan dampak positif pada aspek transparansi dan akuntabilitas, namun efektivitasnya dalam mendongkrak PAD masih rendah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama pada cakupan data yang lebih banyak bersumber dari studi kualitatif dan tidak mengukur dampak finansial secara kuantitatif secara detail. Selain itu, penelitian hanya berfokus pada Kota Bandung sehingga generalisasi ke daerah lain masih terbatas. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan studi komparatif dengan kota lain yang telah menerapkan sistem serupa, serta

menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur kontribusi finansial secara lebih presisi. Penelitian mendatang juga perlu menyoroti aspek perilaku masyarakat dalam adaptasi terhadap sistem digital, sehingga dapat ditemukan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan penerimaan publik terhadap inovasi parkir elektronik.

Daftar Pustaka

- Almeida, & Silva. (2021). Smart mobility and e-parking systems: Assessing policy implementation challenges. *Sustainability*, 13(14), 7652. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su13147652>
- Calcabilla, Budiman, & Dyastari. (2023). Efektivitas penerapan parkir elektronik guna pengurangan penyalahgunaan pungutan parkir di Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/jip.v11i1.969>
- Chen, Zhang, & Wang. (2023). Evaluating the efficiency of urban e-parking policies in reducing illegal parking. *Journal of Transport Policy*, 127, 45–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2023.06.004>
- Dewi. (2024). *Pengaruh implementasi kebijakan Terminal Parkir Elektronik (TPE) terhadap peningkatan penerimaan retribusi parkir Kota Bandung periode 2018–2022*. UIN Sunan Gunung Djati.
- Grindle. (1980). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Hariyoko, Mahmudi, & Firmansyah. (2025). The feasibility of implementing e-parking on the zero-over-dimension over-loading (ODOL) policy in Madiun City. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.7293>
- Hidayat, Munanda, & Armidiana. (2018). Implementasi kebijakan pengelolaan perparkiran (studi pada Dishub Kota Bandung). *Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 10(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/jpan.v10i2.7627>
- Lindgren, & Jansson. (2020). Electronic governance and citizen acceptance: Lessons from digital parking systems. *Government Information Quarterly*, 37(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101486>
- Matland. (1995). Synthesizing the implementation literature: The ambiguity–conflict model. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 5(2), 145–174. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jpart.a037242>
- Meter, V., & Hor, V. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4).
- Moleong. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mutaqin, Permana, & Fauzi. (2025). Efektivitas pelaksanaan kebijakan smart city oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung (studi kasus pengelolaan alat parkir meter dalam program Terminal Parkir Elektronik). *Jurnal Prinsip*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/prinsip.v1i1.2918>

- Nurmawan, Saadah, & Suwondo. (2024). Analisis efektivitas program Terminal Parkir Elektronik sebagai perwujudan smart city Kota Bandung. *Prosiding Seminar Nasional*.
- Putra. (2004). *Menilik kondisi mesin parkir di Kota Bandung, hidup segan mati tak mau*. Ayo Bandung.
- Qohar. (2018). Analisis implementasi kebijakan Terminal Parkir Elektronik di Kota Bandung. *Jurnal Wacana Kinerja*, 21(2), 37–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.31845/jwk.v21i2.108>
- Rahmawati, & Prasetyo. (2022). Implementasi kebijakan smart city melalui e-parking di Yogyakarta. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 7(2), 115–128. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/japi.78962>
- Sabatier, & Mazmanian. (1980). The implementation of public policy: A framework of analysis. *Policy Studies Journal*, 8(4), 538–560. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.1980.tb01266.x>
- Samsu. (2017). *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development (Rusmini, Ed.)*. Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA).
- Santoso, & Widodo. (2022). Tantangan penerapan parkir elektronik terhadap peningkatan PAD di kota besar Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 18(1), 67–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/jian.2022.v18.i01.p06>
- Suherman. (2020). Evaluasi dampak kebijakan mesin parkir elektronik Kota Bandung. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/politicon.v2i1.7919>
- Teturan, & Oja. (2023). Pengelolaan lahan parkir untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 12(1), 45–60.
- Triani, Rusli, & Bonti. (2021). Evaluasi Program ATCS (Area Traffic Control System) di Kota Bandung. *Jurnal Administrasi Negara*, 13(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jane.v13i1.28709>

